



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TERBUKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAT BUDIMAN
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, KERJA SAMA DAN BISNIS
3. NHK : 806021

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/111.5 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	711.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX STANDARD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
2. MOTOR, SCOMADI TECHNICA 200I Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000		
3. MOBIL, PAJERO PAJERO SPORT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	42.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	389.099.989
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.542.099.989
III. HUTANG	Rp.	1.070.820.580
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.471.279.409

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.